

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DI KELURAHAN SUNGAI JAWI DALAM

Era Afna Purnata

Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura

eraafnapurnata@gmail.com

Abstrak

Penulisan jurnal ini dimaksudkan untuk mengetahui proses implementasi program jaminan kesehatan masyarakat di kelurahan sungai jawi dalam. Permasalahan dalam penelitian ini adalah masih ada beberapa warga kurang mampu yang belum terdaftar sebagai peserta program jamkesmas. Hal ini terjadi karena pemerintah kelurahan Sungai Jawi Dalam masih kekurangan sumber daya manusia dalam pendataan warga miskin. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Program Jaminan Kesehatan Masyarakat di Kelurahan Sungai Jawi Dalam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan analisa kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan dalam proses implementasi program jamkesmas sasaran kebijakan menysasar pada warga kurang mampu, namun masih ada beberapa warga yang belum terdaftar. Sumber daya Kantor Kelurahan Sungai Jawi masih diperlukan peningkatan fasilitas kerja dan pegawai yang memiliki kompetensi di bidang pelayanan masyarakat. Komunikasi antar organisasi dalam implementasi program jamkesmas di kelurahan sungai jawi dalam sudah berjalan cukup baik antara pihak kelurahan, puskesmas/rumah sakit dan dinas kesehatan. Kondisi sosial dan ekonomi juga berpengaruh pada keberhasilan program jamkesmas, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sungai jawi dalam sudah cukup baik dan mendukung dalam proses implementasi program Jamkesmas. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi program Jamkesmas di Kelurahan Sungai Jawi Dalam belum berjalan dengan optimal.

Kata kunci : pelaksanaan kebijakan, jaminan kesehatan, sumber daya,

Abstrack

Writing a journal is intended to find out the process of implementing a public health insurance program in urban rivers in the ox . The problem in this study are still some people who have not registered are less capable as a health plan members . This happens because the government Jawi In River village still lacks the human resources in the collection of the poor . The purpose of this study was to determine the factors that affect the implementation of the Community Health Insurance Program in Urban River in Jawi . The method used in this research is descriptive qualitative analysis . The results showed in the process of implementing a health program targeted at policy targets underprivileged citizens , but there are still some people who have not registered . River Village Office resource Jawi work is still needed to improve the facilities and employees who have competence in the field of public service . Communication between organizations in the implementation of a health program in urban rivers in the ox has been going pretty well between the villages , health centers / hospitals and health authorities . Social and economic conditions also influence the success of a health program , social and economic conditions of the river ox in fairly good already and support the process of program implementation JAMKESMAS . From these results it can be concluded that the implementation of the program in the Village of River JAMKESMAS Jawi In not running optimally

Keywords : policy implementation , health insurance , resources ,

A. PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk dapat hidup layak dan produktif. *The World Health Organization (WHO)* mendefinisikan kesehatan dalam arti yang lebih luas pada tahun 1946 sebagai "suatu keadaan fisik, mental, dan sosial kesejahteraan dan bukan hanya ketiadaan penyakit atau kelemahan". Sedangkan dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 1 ayat (1) "Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis". Untuk itu diperlukan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang terkendali biaya dan mutunya.

Berdasarkan konstitusi dan Undang-Undang tersebut, Kementerian Kesehatan sejak tahun 2005 telah melaksanakan program jaminan kesehatan sosial, dimulai dengan program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat /JP-KMM (2005) atau lebih dikenal dengan program Askeskin (2005-2007) yang kemudian berubah nama menjadi program Jamkesmas sampai dengan sekarang. Dalam pelaksanaannya dikota Pontianak Program Jaminan Kesehatan Masyarakat di atur dalam Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Program Jaminan Kesehatan Masyarakat.

Pengembangan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dapat dilakukan dalam upaya menuju pencapaian kepesertaan semesta (*universal coverage*) sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Dalam memperluas cakupan kepesertaan diluar kota sasaran yang sudah tercakup dalam program Jamkesmas (Nasional), Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan sumber daya memadai dapat mengelola dan mengembangkan program Jamkesda di daerahnya masing-masing. Dengan Jamkesda diharapkan masyarakat miskin yang belum terdaftar dalam Jamkesmas tetap dapat memperoleh pelayanan kesehatan gratis di puskesmas atau rumah sakit di daerah.

Program ini telah berjalan cukup lama dan telah banyak hasil yang dicapai terbukti dengan terjadinya kenaikan yang luar biasa dari pemanfaatan program ini dari tahun ke tahun oleh masyarakat miskin dan pemerintah telah meningkatkan jumlah masyarakat yang dijamin maupun pendanaannya. Namun disamping keberhasilan yang telah dicapai, masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu dibenahi antara lain: kepesertaan yang belum tuntas, peran fungsi ganda sebagai pengelola, verifikator dan sekaligus sebagai pembayar atas pelayanan kesehatan, verifikasi belum berjalan dengan optimal, kendala dalam kecepatan pembayaran, kurangnya

pengendalian biaya, penyelenggara tidak menanggung resiko. Seperti yang diberitakan oleh Ruai TV tanggal 29 November 2012 bahwa :

Kuota kepesertaan jamkesmas provinsi kalbar tahun 2012, sebanyak 1.584.451 jiwa, artinya 4,5 juta jiwa penduduk kalbar, 30 persen diantaranya sudah dijamin jamkesmas. Data badan pusat statistik provinsi kalbar menyatakan, angka kemiskinan kalbar hanya 15 persen dari jumlah penduduk kalbar 4,5 juta jiwa, atau sekitar 500 ribu jiwa, sedangkan jamkesmas sudah mencukupi 30 persen penduduk. Namun hingga kini masih didapati peserta jamkesmas yang menggunakan sktm untuk mendapatkan layanan kesehatan.

Masalah di atas sering terjadi pada pengguna kartu Jamkesmas. Tiap tahunnya selalu ada yang tidak mendapat kartu Jamkesmas. Hal ini disebabkan oleh kriteria peserta yang digunakan oleh pemerintah berbeda dari tahun ke tahun. Untuk mencapai tujuan program Jamkesmas tersebut, maka diselenggarakanlah berbagai usaha atau strategi program kesehatan secara menyeluruh, berjenjang dan terpadu. Salah satunya dengan ditingkatkan pelayanan kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Puskesmas adalah penanggung jawab penyelenggara upaya kesehatan untuk jenjang tingkat pertama. Di samping itu, pemerintah dengan berbagai strategi menyusun berbagai kebijakan pembangunan kesehatan masyarakat baik di perkotaan maupun di pedesaan. Selain fungsi puskesmas yang menjadi tempat pelayanan utama, kelurahan juga memiliki fungsi terhadap jalannya program Jamkesmas ini. Kelurahan merupakan unit terkecil dalam suatu pemerintahan. Oleh sebab itu, kelurahan hubungannya lebih dekat dengan masyarakat. Berkaitan dengan program Jamkesmas, kelurahan memiliki fungsi yaitu dalam mendata masyarakatnya dan mendistribusikan kartu Jamkesmas kepada masyarakat. Dengan kata lain, kelurahan merupakan wadah aspirasi masyarakat terhadap jalannya program Jamkesmas.

Permasalahan dari program jaminan kesehatan masyarakat miskin yang tidak tepat sasaran ialah data kependudukan yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Masih banyak pengaduan dari masyarakat miskin tentang pendataan kartu yang mereka miliki. Selain masalah pendataan yang kurang baik, masalah mengenai sosialisasi yang kurang optimal juga menjadi penyebab kurang efisiennya Jamkesmas. Hal ini dikarenakan mereka yang punya kartu Jamkesmas tidak tahu apa itu Jamkesmas dan apa kegunaannya dari Jamkesmas tersebut. Sehingga banyak orang yang telah memiliki kartu tersebut tidak menggunakannya saat berobat ke Puskesmas atau Rumah Sakit. Hal inilah yang melatarbelakangi alasan penulis untuk mengangkat judul

Implementasi Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) di wilayah Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kota Pontianak.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Patton dan Savicky, dalam Nugroho, (2004:14) mengemukakan implementasi merupakan suatu proses yang dinamis yang melibatkan secara terus menerus usaha-usaha untuk mencari apa yang akan dan dapat dilakukan. dengan demikian implementasi mengatur kegiatan-kegiatan yang mengarah pada penempatan suatu program kedalam tujuan kebijakan yang diinginkan. Patton dan Savicky dalam Nugroho, (2004:14) juga menyatakan bahwa implementasi adalah bagian dari proses kebijakan. Pada prinsipnya ada "empat tepat" yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implemmentasi kebijakan. Pertama, apakah kebijakan itu sendiri sudah tepat. Kedua, tepat pelaksanaannya. Ketiga, tepat target/sasaran. Keempat, adalah tepat lingkungan. Teori tersebut masih perlu didukung oleh 3 jenis dukungan, yaitu dukungan poloitik, dukungan strategi, dan dukungan teknis.

Pada hakekatnya tujuan studi implementasi kebijakan adalah untuk mempelajari bagaimana kinerja suatu kebijakan publik serta mengkaji secara kritis faktor-faktor yang mempengaruhi suatu kebijakan (Efendi, 2000). Teori implementasi menurut Edwards III (1980: 9-11), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

1. Komunikasi.
2. Sumber daya.
3. Disposisi.
4. Struktur birokrasi.

Berbeda dengan teori Edwards, menurut Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono, (2005: 99) terdapat lima variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu :

1. Standar dan sasaran kebijakan.
2. Sumber daya.
3. Komunikasi antarorganisasi.
4. Kondisi sosial, ekonomi dan politik.
5. Disposisi implementor
6. Karakteristik agen pelaksana.

Penelitian ini menggunakan teori dari Van Meter dan Van Horn, namun peneliti hanya mengambil empat variabel dari enam variabel teori Van Meter, yaitu Standar dan sasaran kebijakan, Sumber daya, Komunikasi antarorganisasi, Kondisi sosial, ekonomi dan politik, karena menurut peneliti permasalahan yang ada dalam proses implementasi program Jaminan Kesehatan Masyarakat Di Kelurahan Sungai Jawi Dalam sesuai dengan beberapa variabel yang terdapat dari teori implementasi Van Meter dan Van Horn.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya berdasarkan data dan fakta dilapangan dengan menggunakan penelitian kualitatif.

Fokus penelitian ini adalah Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program Jamkesmas Di Kelurahan Sungaijawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis domain (domain analysis) adalah analisis domain (bidang) dilakukan terhadap data yang diperoleh dari pengamatan berperan serta / wawancara atau pengamatan deskriptif yang terdapat dalam catatan lapangan.

Tujuan penelitian ini adalah dimaksudkan untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang yang mempengaruhi implementasi Kinerja Pegawai Kelurahan Sungai jawi Dalam.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono, (2005: 99) terdapat lima variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu; Standar dan sasaran kebijakan, Sumber daya, Komunikasi antarorganisasi., Kondisi sosial, ekonomi dan politik. Berdasarkan teori tersebut peneliti menguraikan pembahasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program jamkesmas di kelurahan sungai jawi dalam.

1. Standar Dan Sasaran Kebijakan

Van Meter dan Van Horn (dalam Subarsono, 2005) mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian sasaran tersebut. Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) diselenggarakan berdasarkan konsep asuransi sosial. Program ini diselenggarakan secara nasional dengan sasaran untuk :

- a) Mewujudkan portabilitas pelayanan sehingga pelayanan rujukan tertinggi yang disediakan Jamkesmas dapat diakses oleh seluruh peserta dari berbagai wilayah.
- b) Agar terjadi subsidi silang dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat miskin.

Hakekat sebuah kebijakan publik adalah harus menguntungkan atau memberi manfaat bagi banyak orang dan menekan risiko seminimal mungkin. Memang tidak ada sebuah kebijakan yang akan memuaskan semua orang, tetapi yang pasti harus memberikan manfaat atau nilai bagi banyak orang. Pengertian banyak orang bukanlah

didasarkan pada mayoritas dan minoritas, karena kebijakan itu sendiri tidak boleh diskriminatif.

Kebijakan publik berawal dari adanya tuntutan atau dukungan dari sekelompok orang dalam upaya mengatasi suatu permasalahan publik, maka dari itu mereka termasuk kedalam elemen penting dari sebuah kebijakan publik. Kelompok sasaran kebijakan (*target group*) yaitu orang atau sekelompok orang, atau organisasi dalam masyarakat yang perilaku atau keadaannya ingin dipengaruhi oleh kebijakan yang bersangkutan. Terkait dengan sasaran Program Jamkesmas agar dapat diakses oleh seluruh peserta dari berbagai wilayah, dalam hal ini kelompok sasaran Program Jamkesmas adalah masyarakat miskin di seluruh Indonesia. Mengenai sasaran kebijakan program jaminan kesehatan masyarakat di Kelurahan Sungai Jawi Dalam, peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Y (32 tahun), Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sungai Jawi Dalam, beliau mengatakan:

“...sasaran jamkesmas diperuntukkan untuk menanggung biaya perawatan kesehatan bagi warga yang kurang mampu, baik yang dirawat di rumah sakit atau di puskesmas, biaya rawat inap dan rawat jalan di tanggung oleh Jamkesmas, termasuk biaya obat juga. Selain dari warga yang sekarang sudah menjadi peserta jamkesmas, kami juga masih menerima keluhan ada warga yang merasa kurang mampu tapi belum punya kartu jamkesmas, menanggapi hal ini kami berusaha berkoordinasi dengan pihak Askes dan puskesmas atau rumah sakit. Hal ini terjadi karena memang kami kekurangan sumber daya untuk mendata seluruh warga yang kurang mampu, selama ini kami hanya menerima data warga miskin dari ketua RT dan RW saja..”

Hasil wawancara dengan Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sungai Jawi Dalam tersebut diatas dapat diketahui bahwa adanya program jamkesmas adalah untuk membantu biaya perawatan kesehatan bagi warga kurang mampu yang membutuhkan. Meski demikian belum semua warga miskin Di Kelurahan Sungai Jawi Dalam memperoleh kartu jamkesmas.

Wawancara dengan seorang warga peserta jamkesmas, ibu Poniem (40 tahun), beliau mengatakan;

“...semenjak ada program jamkesmas keluarga kami bisa berobat gratis, padahal dulu kami tidak berani untuk berobat karena biaya yang mahal, kami merasa pemerintah sudah peduli dengan keadaan kami keluarga yang kurang mampu ini, tapi masih ada tetangga saya yang keadaannya kurang lebih sama seperti keluarga saya mereka belum mendapat kartu jamkesmas, katanya sedang diusahakan, sampai sekarang mereka masih menunggu kartu jamkesmasnya jadi..”

Hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa sasaran program jamkesmas adalah untuk menjamin kesehatan bagi masyarakat miskin di kelurahan sungai jawi dalam, namun masih ada beberapa warga kurang mampu yang belum mendapat kartu jamkesmas. Hal ini menunjukkan bahwa sasaran Program Jamkesmas di Kelurahan Sungai Jawi Dalam belum optimal menjangkau masyarakat miskin. Dengan demikian program jaminan kesehatan masyarakat di Kelurahan Sungai Jawi Dalam masih perlu ditingkatkan kembali agar seluruh warga miskin dapat terdata dan menjadi peserta program jamkesmas.

2. Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

Van Mater dan Van Horn (dalam Subarsono 2005) menegaskan bahwa: “Sumber daya kebijakan (*policy resources*) tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan (implementasi) suatu kebijakan. Kurangnya atau terbatasnyadana atau insentif lain dalam implementasi kebijakan, adalah merupakansumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan”.

a. Kemampuan Sumber Daya Manusia (Pegawai)

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi kinerja organisasi, karena manusia adalah aktor utama setiap organisasi dimana dan apapun bentuknya. Indikator sumber daya manusia dalam hal SDM pegawai kelurahan mencakup dalam aspek kemampuan kerja pegawai meliputi dua ranah yaitu (1) ranah pengetahuan dan (2) ranah keterampilan. Artinya, pegawai yang memiliki kematangan kerja yang tinggi dalam bidang tugas pekerjaan tertentu memiliki pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman untuk melaksanakan tugas pekerjaannya tersebut tanpa arahan orang lain (Blanchard, 1996: 56). Berdasarkan teori tersebut penulis mengukur indikator sumber daya pegawai kelurahan dengan menggunakan dua sub-indikator yaitu Tingkat Pendidikan dan Pengalaman Kerja.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Y (32 tahun), Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sungai Jawi Dalam:

“Dengan lulusan sarjana IPDN, masa kerja 10 tahun dan sebelumnya pernah menjabat sebagai Staf Bagian Pemerintahan Di Kelurahan Sungai Beliang, pengalaman saya menjadi staf sangat banyak, dan saat ini menjabat sebagai Kasi Pemberdayaan Masyarakat, selain itu saya dan semua staf lain pernah beberapa kali mengikuti pelatihan keterampilan administrasi perkantoran yang diselenggarakan Pemerintah Kecamatan Pontianak Barat. Menurut saya secara kualitas sumber daya pegawai kelurahan ini sudah cukup baik, namun kita masih kekurangan dari segi kuantitasnya, untuk seksi pemberdayaan masyarakat hanya ada dua orang staf saja sedangkan tugas yang kami emban cukup banyak”.

Peneliti melakukan wawancara dengan seorang warga, ibu Poniye (40 tahun) , beliau menyatakan;

“...selama ini saya mengurus keperluan administrasi di Kantor Kelurahan ini saya rasa kemampuan pegawainya lumayan bagus, sikapnya juga ramah pada warga yang datang ke Kantor..”

Wawancara di atas menunjukkan bahwa kemampuan sumber daya pegawai di kantor kelurahan sungai jawi dalam sudah cukup baik.

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa lama tingkat pendidikan dan pengalaman kerja Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sungai Jawi Dalam sudah cukup baik. Selain itu seluruh staf di Kantor Kelurahan Sungai Jawi Dalam sudah pernah mengikuti pelatihan administrasi. Meskipun demikian ternyata jumlah pegawai yang ada di kantor kelurahan sungai jawi dalam masih belum memadai, dalam seksi pemberdayaan masyarakat hanya ada dua pegawai sedangkan tugas yang diemban cukup banyak salah satunya mendata warga miskin di seluruh wilayah Kelurahan Sungai Jawi Dalam

b. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Di era globalisasi saat sekarang ini, tentu bagi ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang menuntut adanya penyesuaian dari suatu organisasi baik pemerintah maupun swasta termasuk juga pemenuhan akan tersedianya sarana dan prasarana kerja yang baik dibutuhkan dalam suatu organisasi. Meningkatkan sarana dan prasarana kerja merupakan salah satu upaya untuk memperlancar pelaksanaan tugas, sehingga kendala-kendala yang dihadapi oleh pegawai dalam melaksanakan pekerjaan yang diberikan secara bertahap dapat diminimalisir serta pelayanan yang diberikan dibidang administrasi tidak menjadi lambat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Y (32 tahun), Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sungai Jawi Dalam:

“Fasilitas sarana dan prasarana di kantor Kelurahan Sungai Jawi Dalam memang terbilang kurang dalam jumlah maupun kualitasnya, namun dengan segala kekurangan ini kami terus berusaha memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat ”

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan mengenai kurangnya sarana dan prasarana antara lain dari ruangan yang terbatas hingga kurangnya jumlah komputer untuk dioperasikan oleh pegawai, sering kali komputer tersebut rusak serta kondisi kantor yang kurang memadai.

Mengenai fasilitas di Kantor Kelurahan Sungai Jawi Dalam, peneliti melakukan wawancara dengan seorang warga Ibu Poniye (40 tahun), beliau menyatakan;

“...menurut saya fasilitas sarana dan prasarana di kantor kelurahan ini sudah cukup baik dan memadai, sepengetahuan saya jumlah komputer dan perlengkapan lainnya juga cukup memadai..”

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa sarana dan prasarana di kantor kelurahan sungai jawi dalam sudah cukup memadai dan cukup menunjang pelayanan pada masyarakat.

Berdasarkan hasil diatas, dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana di Kantor Kelurahan Sungai Jawi Dalam kurang memadai dalam mendukung kegiatan pelayanan masyarakat. Keterbatasan sarana dan prasarana di Kantor Kelurahan Sungai Jawi Dalam dapat mengakibatkan pelayanan pada masyarakat terhambat.

3. Komunikasi antar organisasi

Menurut Van Horn dan Van Mater (dalam Subarsono, 2005) agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (*implementors*) yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa yang menjadi standar dan tujuan kebijakan harus konsisten dan seragam (*consistency and uniformity*) dari berbagai sumber informasi. Jika tidak ada kejelasan dan konsistensi serta keseragaman terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan, maka yang menjadi standar dan tujuan kebijakan sulit untuk bisa dicapai. Dengan kejelasan itu para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya dan tahu apa yang harus dilakukan.

Implementasi kebijakan yang efektif sangat ditentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten (*accuracy and consistency*) (Van Mater dan Varn Horn, dalam Subarsono, 2005). Disamping itu, koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil, demikian sebaliknya.

Penyelenggaraan program jaminan kesehatan masyarakat merupakan kerja sama dari berbagai pihak antara lain; pihak kecamatan/kelurahan selaku penyelenggara administrasi, pihak Dinas Kesehatan selaku penanggung biaya, dan pihak rumah sakit/puskesmas selaku penyedia pelayanan kesehatan. Agar program jaminan kesehatan masyarakat berjalan dengan baik, tentu dibutuhkan komunikasi dan kerjasama antar instansi tersebut. Mengenai komunikasi dan kerja sama antar instansi tersebut diatas, peneliti melakukan wawancara Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Y (32 tahun), Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sungai Jawi Dalam;

"...kerjasama pelaksanaan program jaminan kesehatan masyarakat dengan pihak Dinas Kesehatan dan pihak rumah sakit selama ini sudah berjalan dengan baik, semua kebutuhan administrasi bagi warga peserta jamkesmas yang memerlukan perawatan di rumah sakit kami bantu prosesnya, harapannya kerjasama seperti ini dapat terus berjalan dengann baik kedepannya.."

Wawancara di atas menunjukkan koordinasi antar instansi dalam pelaksanaan Jamkesmas di Kelurahan Sungai Jawi Dalam sudah cukup baik. Mengenai hal ini peneliti melakukan wawancara dengan seorang warga, Ibu Poniem (40 tahun), beliau menyatakan; *"...saya merasa pelayanan Jamkesmas di puskesmas atau rumah sakit sudah lumayan bagus lah, pelayanan di kantor Dinas Kesehatan dan pengurusan di Kantor Kelurahan juga sudah bagus.."*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa komunikasi dan kerja sama antar organisasi dalam proses implementasi program jaminan kesehatan masyarakat sudah berjalan dengan baik. Komunikasi dan koordinasi antar organisasi yang baik dalam proses tentu dapat mendukung implementasi Program Kebijakan Jaminan Kesehatan Masyarakat di Kelurahan Sungai Jawi Dalam.

4. Kondisi Sosial, Ekonomi Dan Politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi

kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

Dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan, faktor kondisi sosial, ekonomi dan politik selalu mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Keberhasilan implementasi program jaminan kesehatan masyarakat di kelurahan sungai jawi dalam di pengaruhi kondisi sosial, ekonomi dan politik. Mengenai hal ini peneliti melakukan wawancara dengan Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Y (32 tahun), Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sungai Jawi Dalam:

"...kondisi sosial dan ekonomi masyarakat memang berpengaruh pada program jamkesmas, masyarakat yang terdidik lebih mudah mengerti dan memahami kebijakan ini, bagaimana proses dan syarat pendaftarannya, siapa saja yang berhak menjadi peserta, kondisi ekonomi juga berpengaruh bagaimana program jamkesmas ini benar-benar tepat sasaran pada warga yang kurang mampu.."

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa kondisi sosial masyarakat cukup berpengaruh pada proses implementasi program jaminan kesehatan masyarakat di kelurahan sungai jawi dalam.

Wawancara dengan seorang warga, ibu Poniem (40 tahun) beliau mengatakan;

"...keadaan sosial di kelurahan sungai jawi dalam ini sudah termasuk baik, sebagian besar warga sudah paham dan mengerti peruntukkan program jamkesmas, dan kondisi ekonomi warga yang kurang mampu dibantu untuk berobat dengan jamkesmas, menurut saya program jamkesmas sudah tepat sasaran di sungai jawi dalam ini.."

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat di kelurahan sungai jawi dalam sudah cukup baik, sehingga program jaminan kesehatan masyarakat dapat benar-benar tepat sasaran pada warga yang kurang mampu.

Berdasarkan hasil keterangan diatas dapat diketahui bahwa kondisi sosial, ekonomi dan politik di kelurahan sungai jawi dalam sudah cukup baik. Kondisi sosial, ekonomi dan politik masyarakat Sungai Jawi Dalam yang sudah cukup baik tentu dapat mendukung keberhasilan implementasi Program Jaminan Kesehatan Masyarakat.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

a) Standar Dan Sasaran Kebijakan

Sasaran Program Jaminan Kesehatan Masyarakat di Kelurahan Sungai Jawi Dalam adalah masyarakat miskin, namun dalam kenyataannya masih ada beberapa warga yang tergolong kurang

mampu tidak mendapat kartu jamkesmas. sehingga program jamkesmas terkesan kurang tepat sasaran dalam pelaksanaannya di kelurahan sungai jawi dalam.

b) Sumber Daya

Sumber daya kelurahan dalam proses implementasi program jamkesmas sudah cukup baik, meskipun baik sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana di kantor kelurahan masih perlu ditingkatkan, misalnya sumber daya pegawai yang memiliki kompetensi di bidang sosial masyarakat dan fasilitas kerja kantor yang perlu ditingkatkan.

c) Komunikasi antar organisasi

Komunikasi antar organisasi dalam proses implementasi program jamkesmas di kelurahan sungai jawi dalam sudah berjalan dengan baik, koordinasi antara pihak kelurahan, puskesmas/rumah sakit dan PT. ASKES (persero) sudah terjalin dengan baik, sehingga pelayanan pada masyarakat dapat optimal.

d) Kondisi Sosial, Ekonomi Dan Politik

Kondisi sosial, ekonomi dan politik masyarakat di kelurahan sungai jawi dalam cukup mendukung implementasi program jamkesmas, masyarakat sudah cukup paham dan mengerti hak dan kewajiban masing-masing dalam program jamkesmas. kondisi ekonomi masyarakat sungai jawi dalam masih belum merata, sehingga masih ada warga yang kurang mampu namun luput dari perhatian pemerintah kelurahan.

2. Saran

- a. Sasaran program jamkesmas agar dapat lebih tepat sasaran pada warga yang kurang mampu, dengan memperhatikan kebutuhan rumah tangga dan penghasilan rumah tangga tersebut, keadaan tempat tinggal juga dapat dijadikan tolok ukur untuk menentukan warga yang berhak menjadi peserta program jamkesmas.
- b. Mengenai sumber daya manusia Kelurahan Sungai Jawi Dalam agar ditambah jumlah pegawai, selain itu pegawai yang ada dibekali pelatihan kemampuan kerja dan sikap yang mendukung kebijakan publik. Sarana dan prasarana Di Kelurahan Sungaijawi Dalam masih belum memadai, untuk dapat melaksanakan kebijakan dan

pelayanan publik secara optimal perlu dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai.

- c. Komunikasi dan koordinasi antar instansi yang sudah berjalan dengan baik dalam implementasi program agar dapat dipertahankan dan ditingkatkan kembali.

REFERENSI

Agustinus, 2003. *Kebijakan Publik:Konsep dan Strategi*. Semarang : Universitas Diponegoro.

Blanchard, Ken. 1996. *Leading at Higher Level, Revised and Expanded Edition:Blanchard on Leadership and Creating High Performing Organizations*.New Jersey: FT Press.

Edward III, George.C, 1980, *Implementation Public Policy, Congressional Quarterly Press, Washington*.

Moleong J, Lexy. 2000. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.

Ratminto & Atik Septi Winarsih, 2007. *Manajemen Pelayanan : Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen's Charter dan Standar Pelayanan Minimal*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Subarsono. AG. 2005. *Analisi Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*.Cet.1. Yogakarta:Pustaka Pelajar.

Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang : Bayumedia Publishing.

Sumber Lainnya :

Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) Republik Indonesia Nomor 902/Menkes/Per/V/2011 Tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS)

Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Program Jaminan Kesehatan Masyarakat

Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Umum, PT. ASKES (Persero)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 1 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan Prof.Dr.H.Hadari Nawawi, Pontianak Kotak Pos 78124

Homepage: <http://jurnal.mahasiswa.fisip.untan.ac.id>

Email: jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : ERA AFNA PURNATA
 NIM / Periode lulus : E2111096 / 2013 / 2019
 Fakultas/Jurusan : ISIP / IAN
 E-mail address/HP : Erappurnata@gmail.com / 089693834845

demikian pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa.....*) pada Program Studi.....IAN..... Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **):

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DIKEWRAHAN SUNDAI JAWI DALAM

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- secara *fulltext*
- content* artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal 2-9-2014

Dr. Arifin
NIP. 1971 05 02 1997 02 1 00 2

Dibuat di : ~~02-05-2014~~ PONTIANAK
Pada tanggal: 02-05-2014

ERA AFNA PURNATA
(ERA AFNA PURNATA)
nama terang dan tanda tangan mhs

catatan:

*tuliskan nama jurnal sesuai prodi masing-masing
(Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)

setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah-penyerahan berkas (submission author).